

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Definisi Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan *output* per kapita dalam jangka panjang (Boediono, 1996). Keadaan ekonomi suatu daerah dikatakan tumbuh ketika *output* yang dihasilkan mengalami kenaikan pada tahun-tahun berikutnya. Menurut Arsyad (1999), definisi lain dari pertumbuhan ekonomi adalah naiknya Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara tanpa memperhatikan kenaikan tersebut lebih kecil atau lebih besar dari tingkat pertumbuhan penduduk, dan apakah terjadi perubahan dan pergeseran struktur ekonomi atau tidak.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan prosesnya yang berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi. Bertambahnya penduduk yang terjadi secara terus menerus menyebabkan kebutuhan ekonomi juga meningkat, maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun. Hal ini bisa diperoleh melalui peningkatan *output* agregat (produksi barang dan jasa) atau Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahun. Jadi, dalam pengertian makro, pertumbuhan ekonomi adalah penambahan PDB yang berarti juga penambahan pendapatan nasional (Tambunan, 2001).

Dalam tingkat regional, pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh besarnya PDRB dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah penambahan pendapatan masyarakat secara menyeluruh pada suatu wilayah (Tarigan, 2016). Laju pertumbuhan PDRB pada akhirnya juga akan berdampak pada laju pertumbuhan PDB. Sehingga, untuk meningkatkan PDB, maka harus didorong oleh peningkatan PDRB tiap wilayah di suatu negara.

Arsyad pada tahun 1988 mengungkapkan bahwa faktor-faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam setiap masyarakat adalah:

- a. Akumulasi modal, termasuk semua investasi baru yang berwujud tanah (lahan), peralatan fiskal, dan sumber daya manusia.
- b. Pertumbuhan populasi.
- c. Kemajuan teknologi.

2. Teori Pertumbuhan Ekonomi Wilayah

a. Teori Ekonomi Klasik

Tokoh dalam teori ini adalah Adam Smith (1723-1790). Dalam teori ini menyatakan bahwa masyarakat memiliki kebebasan yang luas dalam menentukan kegiatan ekonomi yang dirasa paling baik. Hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah adalah memberi kebebasan kepada individu atau badan untuk berusaha pada lokasi yang ditentukan, tidak mengeluarkan peraturan yang menghambat kegiatan ekonomi, tidak membuat tarif pajak daerah lebih tinggi dari daerah lain, menjaga keamanan

dan ketertiban, menyediakan fasilitas dan prasarana serta berusaha menciptakan iklim kegiatan ekonomi yang kondusif (Tarigan, 2005).

Teori Smith akan tumbuh subur pada kondisi pasar sempurna. Pemerintah daerah harus membuat kondisi pasar mengarah pada kondisi pasar sempurna. Pemerintah daerah tidak memberi hak monopoli (penjual tunggal) atau monopsoni (pembeli tunggal) kepada pihak swasta serta pemerintah daerah seharusnya menyebarluaskan informasi tentang pasar kepada masyarakat (Tarigan, 2005).

b. Teori Harrod-Domar dalam Sistem Regional

Teori ini dikembangkan pada waktu yang hampir bersamaan oleh Roy F. Harrod (1948) di Inggris dan Evsey D. Domar (1957) di Amerika Serikat. Harrod-Domar mendasarkan teorinya berdasarkan mekanisme pasar tanpa campur tangan pemerintah. Namun, kesimpulannya menunjukkan bahwa pemerintah perlu merencanakan besarnya investasi untuk mencapai keseimbangan dari sisi penawaran dan sisi permintaan barang/ jasa. (Tarigan, 2005). Menurut Harrod-Domar dalam Tarigan (2005), teori ini didasarkan pada beberapa asumsi berikut:

1. Perekonomian bersifat tertutup.
2. Hasrat menabung ($MPS = s$) adalah konstan.
3. Tingkat produksi memiliki koefisien tetap (*constant return to scale*).
4. Tingkat pertumbuhan angkatan kerja (n) konstan dan sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk.

Pertumbuhan jangka panjang yang mantap (seluruh kenaikan produksi dapat diserap oleh pasar) dapat tercapai jika terpenuhinya syarat keseimbangan sebagai berikut (Tarigan, 2005):

$$g = k = n$$

Di mana:

$g = Growth$ (tingkat pertumbuhan *output*).

$k = Capital$ (tingkat pertumbuhan modal).

$n =$ Tingkat pertumbuhan angkatan kerja.

Agar tercapai keseimbangan, maka antara tabungan (S) dan investasi (I) harus terdapat kaitan yang saling menyeimbangkan. Berdasarkan teori ini, harus diperhatikan produk-produk yang hanya dipakai untuk memenuhi kebutuhan lokal. Sebaiknya produk tersebut juga diusahakan untuk dapat diekspor. Namun, jika usaha untuk menembus pasar ekspor sulit dilakukan, maka produk tersebut tidak perlu dipaksakan melebihi kebutuhan lokal karena dapat menurunkan harga jual dan dapat merugikan produsen (Tarigan, 2005).

c. Teori Pertumbuhan Neoklasik

Teori ini dikembangkan oleh Robert M. Sollow (1970) dari Amerika dan T. W. Swan (1956) dari Australia. Dalam teori ini, Sollow-Swan menggunakan unsur pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital (modal), kemajuan teknologi dan besarnya *output* yang saling berinteraksi. Selain itu, Sollow-Swan juga menggunakan model fungsi produksi yang

memungkinkan adanya substitusi antara kapital (K) dan tenaga kerja (L). Tingkat pertumbuhan berasal dari tiga sumber yaitu akumulasi modal, bertambahnya penawaran tenaga kerja dan peningkatan teknologi (Tarigan, 2005).

d. Teori Pertumbuhan Jalur Cepat yang Disinergikan

Teori ini diperkenalkan oleh Samuelson (1955). Setiap negara/wilayah perlu melihat sektor/ komoditi yang memiliki potensi besar dan dapat dikembangkan dengan cepat. Dengan kebutuhan modal yang sama, sektor tersebut dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar, dapat memproduksi dalam waktu yang relatif singkat dan mampu memberikan sumbangan bagi perekonomian yang cukup besar. Perkembangan sektor tersebut akan mendorong sektor lain berkembang, sehingga perekonomian secara keseluruhan akan mengalami pertumbuhan (Tarigan, 2005).

Mensinergikan sektor-sektor adalah membuat sektor-sektor saling terkait dan saling mendukung. Pertumbuhan sektor yang satu akan mendorong pertumbuhan sektor lainnya. Menggabungkan kebijakan jalur cepat (*turnpike*) dan mensinergikannya dengan sektor lain akan mendorong perekonomian mengalami pertumbuhan yang cepat (Tarigan, 2005).

e. Teori Basis Ekspor Richardson

Teori ini dikemukakan oleh Tiebout. Dalam teori ini membagi kegiatan produksi menjadi dua yaitu kegiatan basis dan non basis. Kegiatan basis yaitu kegiatan yang bersifat *exogeneous* artinya tidak terikat pada kondisi internal perekonomian wilayah dan sekaligus berfungsi mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi lainnya. Adapun kegiatan non basis adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah itu sendiri, dan pertumbuhannya bersifat *endogeneous* artinya tergantung kepada kondisi umum perekonomian wilayah tersebut (Tarigan, 2005).

Ekspor tidak hanya mencakup barang/ jasa yang dijual ke luar daerah, tetapi termasuk barang/ jasa yang dibeli orang dari luar daerah walaupun transaksi tersebut terjadi di dalam daerah itu sendiri. Kegiatan yang hasilnya dijual ke luar daerah atau mendatangkan uang dari luar daerah adalah kegiatan basis, sedangkan kegiatan non basis adalah kegiatan yang melayani kebutuhan masyarakat di daerah itu sendiri, baik pembeli maupun sumber uangnya berasal dari daerah itu sendiri (Tarigan, 2005).

Bertambah banyaknya kegiatan basis dalam suatu daerah akan menambah arus pendapatan ke dalam daerah yang bersangkutan, menambah permintaan barang dan jasa sehingga akan menimbulkan kenaikan volume kegiatan ekonomi. Sebaliknya, berkurangnya kegiatan basis akan mengurangi pendapatan suatu daerah dan turunnya permintaan terhadap barang dan jasa dan akan menurunkan volume kegiatan ekonomi (Richardson, 2001).

Beberapa metode yang dapat digunakan untuk memilah antara kegiatan basis dan kegiatan non basis dikemukakan sebagai berikut (Tarigan, 2005):

1) Metode langsung

Metode langsung dilakukan dengan cara survei langsung kepada pelaku usaha ke mana mereka memasarkan barang yang diproduksi dan dari mana mereka membeli bahan-bahan kebutuhan untuk menghasilkan produk tersebut.

2) Metode tidak langsung

Salah satu metode tidak langsung yang dapat diterapkan adalah dengan menggunakan asumsi atau disebut metode asumsi. Dalam metode ini, berdasarkan kondisi wilayah tersebut ada kegiatan yang diasumsikan sebagai kegiatan basis dan non basis.

3) Metode campuran

Dalam metode ini, diperlukan survei untuk mengumpulkan data sekunder yang biasanya diperoleh dari beberapa instansi pemerintah atau lembaga pengumpul data seperti Badan Pusat Statistik. Setelah memperoleh data sekunder, kemudian data tersebut dianalisis untuk menentukan kegiatan sektor apa yang dianggap basis dan non basis. Asumsinya jika 70% atau lebih dari hasil produksi diperkirakan dapat dijual ke luar wilayah, maka kegiatan tersebut dianggap basis. Sebaliknya, jika 70% produknya atau lebih dipasarkan di dalam daerah/ lokal, maka hasil produksi dianggap non basis.

4) Metode *Location Quotient* (LQ)

Metode ini membandingkan porsi lapangan kerja/ nilai tambah untuk sektor tertentu di tingkat daerah dengan porsi lapangan kerja/ nilai tambah untuk sektor yang sama pada tingkat nasional. Apabila yang digunakan adalah data lapangan kerja maka rumus yang digunakan adalah :

$$LQ = \frac{l_i/e}{L_i/E} \dots\dots\dots(2.1)$$

Keterangan:

l_i = Banyaknya lapangan kerja sektor i di wilayah analisis.

e = Banyaknya lapangan kerja di wilayah analisis.

L_i = Banyaknya lapangan kerja sektor i secara nasional.

E = Banyaknya lapangan kerja secara nasional.

Faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumber daya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor akan menghasilkan kekayaan daerah dan menciptakan peluang kerja (*job creation*) (Arsyad, 1999).

Kegiatan basis bisa berbeda antara kota dengan wilayah di bawahnya. Basis di luar kota umumnya adalah pada sektor penghasil barang seperti pertanian, industri dan pertambangan. Adapun basis perekonomian

di kota pada umumnya didominasi oleh kegiatan perdagangan dan jasa termasuk jasa angkutan. Meskipun perdagangan dan jasa menjadi basis ekonomi di kota, namun kegiatan tersebut tetap terikat pertumbuhannya terhadap pertumbuhan sektor basis pada wilayah di bawahnya. Jika kota dan wilayah di bawahnya dijadikan satu satuan wilayah analisis, maka kegiatan basis adalah yang menjual produknya keluar dari wilayah analisis atau mendatangkan uang dari luar wilayah analisis. Dalam kondisi ini, kegiatan perdagangan dan jasa yang tetap berfungsi sebagai basis menjadi menciut (Tarigan, 2005).

f. Model Pertumbuhan Interregional

Model ini memasukkan dampak dari daerah tetangga, sehingga dinamakan model interregional. Sumber-sumber perubahan pendapatan regional meliputi (Tarigan, 2005):

- 1) Perubahan pengeluaran otonom regional (misalnya investasi dan pengeluaran pemerintah).
- 2) Perubahan tingkat pendapatan suatu daerah atau beberapa daerah lain yang berada dalam suatu sistem yang akan terlihat dari perubahan ekspor dari daerah i.
- 3) Perubahan salah satu di antara parameter-parameter model (hasrat konsumsi marginal, koefisien perdagangan interregional atau tingkat pajak marginal).

Apabila ekspor daerah i hanya meningkat sedikit, daerah akan tertinggal. Sebaliknya, apabila ekspor daerah i naik cukup tinggi maka pendapatan daerah i akan meningkat mengejar daerah di sekitarnya. Dalam model pertumbuhan interregional menunjukkan bahwa kemampuan untuk meningkatkan ekspor sangat berpengaruh dalam menjamin kelangsungan pertumbuhan suatu daerah dan menciptakan pemerataan pertumbuhan antar daerah (Tarigan, 2005).

g. Teori Lokasi

Teori lokasi merupakan ilmu yang menyelidiki tata ruang kegiatan ekonomi atau ilmu yang menyelidiki alokasi geografis dari sumber-sumber yang potensial, serta hubungannya dengan atau pengaruhnya terhadap keberadaan berbagai macam usaha/ kegiatan lain baik ekonomi maupun sosial (Tarigan, 2006). Analisis ini dapat dikembangkan untuk melihat suatu lokasi yang memiliki daya tarik.

Salah satu faktor yang menentukan daya tarik suatu wilayah adalah tingkat aksesibilitas. Tingkat aksesibilitas yaitu tingkat kemudahan untuk mencapai suatu lokasi ditinjau dari lokasi lain di sekitarnya (tarigan, 2006).

3. Pembangunan Ekonomi Daerah

Arsyad (1999) mengemukakan bahwa pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan juga

masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Untuk menciptakan pembangunan daerah diperlukan kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat di daerah tersebut. Pemerintah melaksanakan kegiatan yang *output*-nya bersifat membuka peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan kinerja yang mereka lakukan.

Menurut kutipan Tjiptoherijanto (1997), pembangunan daerah erat kaitannya dengan suatu proses desentralisasi pembangunan yang berkembang pada saat ini. Pembangunan daerah perlu dilaksanakan secara terpadu, selaras, serasi dan seimbang, serta diarahkan agar pembangunan yang berlangsung pada tiap daerah sesuai dengan prioritas dan potensi daerah.

Dalam Sukirno tahun 1985 menyatakan pembangunan ekonomi mempunyai tiga sifat penting, yaitu:

- 1) Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses, yang berarti merupakan perubahan yang terjadi terus-menerus.
- 2) Pembangunan ekonomi merupakan usaha untuk menaikkan tingkat pendapatan per kapita.
- 3) Kenaikan pendapatan per kapita harus berlangsung dalam jangka panjang.

Prayitno (1986) menjelaskan bahwa pembangunan memiliki cakupan lebih luas dari sekedar perubahan keadaan dari miskin menjadi kaya dan dari ekonomi pedesaan menjadi ekonomi perkotaan modern. Pembangunan bukan sekedar gagasan mengenai perbaikan ekonomi semata, tetapi juga mengenai harga diri manusia, ketentramannya, keadilan dan persamaan yang lebih tinggi.

Pembangunan yang diterapkan di setiap daerah berbeda-beda sesuai dengan potensi yang dimiliki tiap daerah. Kebijakan yang diterapkan pada satu daerah belum tentu sesuai untuk diterapkan pada daerah lain. Begitu pula pengembangan tidak dapat dilakukan pada semua sektor ekonomi karena akan menyebabkan penggunaan sumber daya yang tidak efisien.

Dikutip dalam Djojohadikusumo (1987) bahwa keberhasilan suatu pembangunan ditentukan oleh faktor-faktor berikut:

- 1) Sumber daya alam yang dimiliki.
- 2) Infrastruktur fisik yang tersedia.
- 3) Keadaan dan perkembangan demografi.
- 4) Permintaan di pasaran dunia akan bahan dan barang yang dihasilkan.
- 5) Kemampuan untuk menguasai teknologi.
- 6) Keadaan dan perkembangan sumber daya manusianya.
- 7) Kebijaksanaan pemerintahnya.

Prayitno (1986) menyatakan manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya pembangunan adalah sebagai berikut:

- 1) *Output* (kekayaan) dari masyarakat akan bertambah.
- 2) Kesempatan untuk memilih menjadi lebih luas.
- 3) Memberikan kemampuan yang lebih besar untuk menguasai alam dan dapat meningkatkan kebebasan untuk mengadakan suatu tindakan.
- 4) Dapat diperoleh suatu tambahan kebebasan untuk kesenangan yang lebih luas.
- 5) Mengurangi *gap* antara yang kaya dan yang miskin, antara negara maju dan negara sedang berkembang.
- 6) Semakin banyak sarana dan prasarana yang tersedia.

4. Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah

Perencanaan pembangunan ekonomi daerah dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan sumber daya publik yang tersedia di daerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumber daya swasta secara bertanggungjawab (Arsyad, 1999).

Sebagian besar rencana pembangunan didasarkan pada tiga model makroekonomi, yaitu (Kuncoro, 2010):

- a. Model pertumbuhan agregat.
- b. Model multisektoral dan proyeksi sektoral/ model *input-output*.
- c. Penilaian proyek dan analisa biaya-manfaat sosial.

Pemerintah memiliki peran yang penting dalam upaya pembangunan daerah. Fungsi campur tangan pemerintah adalah mencegah dampak buruk dari mekanisme pasar dan mengupayakan agar pembangunan dan hasilnya dapat dinikmati di seluruh daerah. Keadaan sosial ekonomi yang berbeda pada tiap daerah membawa implikasi bahwa cakupan campur tangan pemerintah berbeda pula, perbedaan sistem yang diberlakukan pada tiap daerah mengakibatkan tingkat kesejahteraan berbeda (Arsyad, 2005).

Pada otonomi daerah dalam kerangka NKRI ini, kewenangan tidak diberikan secara keseluruhan kepada daerah, tetapi dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota. Kewenangan dalam bidang pertahanan dan keamanan, politik luar negeri, fiskal dan moneter, peradilan dan agama masih berada pada pemerintah pusat. Provinsi diberikan kewenangan khusus untuk bidang yang bersifat lintas sektoral seperti perhubungan, perkebunan, dan kehutanan. Sedangkan daerah kabupaten atau kota diberikan kewenangan yang lebih besar selain dari kewenangan pusat dan provinsi. Hal ini berarti bahwa otonomi daerah sebenarnya dititikberatkan pada kabupaten/ kota dalam rangka lebih mendekatkan pemerintahan dengan seluruh rakyat yang dipimpinnya (Sjafrizal, 2014).

Permasalahan yang terkandung dalam perencanaan wilayah dapat dikelompokkan sebagai berikut (Tarigan, 2005):

- a. Permasalahan mikro, yaitu permasalahan yang berkaitan dengan pembangunan proyek itu sendiri, baik ditinjau dari sudut pandang pengelola maupun dari sudut pandang pemberi ijin proyek. Berikut merupakan pengelompokan permasalahan mikro, yaitu:
 - 1) Permasalahan teknis yaitu permasalahan yang meliputi peraturan pemerintah mengenai tata guna suatu lahan.
 - 2) Permasalahan manajerial (pengelolaan) yaitu apakah dapat dioperasikan sebagaimana mestinya setelah proyek selesai.
 - 3) Permasalahan finansial (keuangan) meliputi cukup atau tidaknya dana untuk menyelesaikan proyek dan adakah dana operasional untuk kelak dalam pengoperasian proyek. Jika proyek tersebut bertujuan untuk mendapatkan laba, apakah proyek akan memperoleh laba yang menguntungkan.
 - 4) Permasalahan ekonomi yaitu apakah sumber daya yang dikorbankan dalam suatu proyek akan memberikan manfaat yang lebih besar apabila dibandingkan dengan biaya yang dikorbankan.
 - 5) Permasalahan dampak lingkungan yaitu apakah suatu proyek tidak akan menghasilkan dampak lingkungan yang terlalu berlebihan, baik dalam proses pembangunan maupun ketika pengoperasian proyek tersebut.

- 6) Sikap sosial masyarakat yaitu apakah masyarakat setempat dapat menerima kehadiran dari proyek tersebut.
 - 7) Permasalahan keamanan yaitu apakah kondisi wilayah cukup aman, termasuk pada lokasi dibangunnya proyek.
- b. Permasalahan makro, yaitu permasalahan pemerintah mengenai keterkaitan proyek dengan program dari pemerintah secara keseluruhan. Berikut merupakan pengelompokan permasalahan makro dari penggunaan lahan, yaitu:
- 1) Kesesuaian lokasi yaitu lokasi proyek harus dapat disesuaikan dengan daya dukung dan kesesuaian lahan secara makro regional.
 - 2) Strategi pengembangan ekonomi wilayah yaitu apakah proyek tersebut cukup strategis dan sesuai dengan rencana umum pengembangan wilayah.
- c. Sistem transportasi/ penyediaan prasarana yaitu apakah lokasi proyek dapat berdampak pada sistem transportasi yang tidak efisien.
- d. Sistem pembiayaan pembangunan di daerah yaitu proyek yang diusulkan harus sesuai dengan sumber dana yang akan membiayai proyek tersebut.

Perumusan dan keberhasilan suatu rencana memerlukan hal-hal sebagai berikut (Jhingan, 2013):

- a. Komisi perencanaan. Pembentukan suatu komisi perencanaan yang harus diorganisasi dengan cara yang tepat merupakan prasyarat utama bagi suatu perencanaan.

- b. Data statistik. Perencanaan yang kuat memprasyaratkan adanya survei yang dilakukan secara menyeluruh terhadap sumber potensial yang ada di suatu negara dan segala kekurangan yang menyertai.
- c. Tujuan. Dengan adanya rencana dapat ditetapkan beberapa tujuan berikut: meningkatkan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita, memperluas kesempatan kerja, mengurangi ketimpangan pendapatan dan kesejahteraan dan pemusatan kekuatan ekonomi, menaikkan produksi pertanian, industrialisasi perekonomian, mencapai pembangunan wilayah berimbang, mencapai swasembada dan sebagainya.
- d. Penetapan sasaran dan prioritas. Permasalahan berikutnya adalah untuk mencapai tujuan yang ditentukan dalam suatu rencana, maka perlu ditetapkan sasaran dan prioritas.
- e. Mobilisasi sumber. Suatu rencana untuk menetapkan pembiayaan sektor negara yang akan dijadikan sebagai dasar mobilisasi sumber-sumber yang perlu.
- f. Rencana yang seimbang. Suatu rencana harus menjamin keseimbangan yang tepat dalam suatu perekonomian.
- g. Administrasi yang efisien dan tidak korup. Administrasi yang kuat, efisien dan tidak korup adalah syarat mutlak keberhasilan perencanaan.
- h. Kebijakan pembangunan yang tepat. Pemerintah harus menetapkan kebijakan pembangunan yang tepat demi berhasilnya perencanaan

pembangunan dan untuk menghindari kesulitan yang mungkin timbul dalam proses pembangunan.

- i. Ekonomis dalam administrasi. Dalam pengembangan bagian-bagian kementerian dan pemerintahan, setiap usaha harus dibuat berdampak ekonomis dalam administrasi.
- j. Dasar pendidikan. Dasar pendidikan yang kuat diperlukan untuk menciptakan administrasi yang efisien dan bersih.
- k. Teori konsumsi. Salah satu syarat penting dalam perencanaan pembangunan yaitu adanya teori konsumsi.
- l. Dukungan masyarakat. Dukungan masyarakat merupakan faktor penting bagi keberhasilan rencana di dalam suatu negara demokratis.

Adapun implikasi pokok dari perencanaan pembangunan ekonomi daerah adalah (Arsyad, 1999):

- a. Perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang realistis memerlukan pemahaman tentang hubungan antara daerah dengan lingkungan nasional.
- b. Sesuatu yang tampaknya baik secara nasional belum tentu baik untuk daerah dan sebaliknya.
- c. Perangkat kelembagaan yang tersedia untuk pembangunan daerah, misalnya administrasi, proses pengambilan keputusan, otoritas biasanya berbeda antara tingkat daerah dengan tingkat pusat. Perencanaan daerah yang efektif harus dapat membedakan apa yang seharusnya dilakukan dan yang dapat dilakukan.

5. Sektor Unggulan

Sektor unggulan adalah sektor yang mampu mendorong pertumbuhan atau perkembangan bagi sektor-sektor lainnya, baik sektor yang mensuplai *input*-nya maupun sektor yang memanfaatkan *output*-nya sebagai *input* dalam proses produksinya (Widodo, 2006). Suatu sektor ekonomi dapat dikategorikan sebagai sektor unggulan ketika sektor tersebut dapat bersaing dengan wilayah lain pada sektor yang sama. Sektor unggulan pada tiap daerah berbeda-beda sesuai dengan sumber daya alam yang tersedia, kondisi lingkungan, modal dan juga sumber daya manusia. Jika sektor pada suatu wilayah dapat bersaing dan lebih unggul daripada sektor yang sama di wilayah lain, maka sektor tersebut memiliki pengaruh besar bagi ekonomi di wilayahnya.

Berikut merupakan syarat agar suatu sektor tertentu dapat dijadikan sebagai sektor unggulan (Rachbini, 2001):

- a. Sektor tersebut menghasilkan produk yang mempunyai permintaan cukup besar.
- b. Akibat perubahan teknologi, maka fungsi produksi baru bergeser dengan pengembangan kapasitas yang lebih luas.
- c. Terjadi peningkatan investasi dari hasil produksi yang menjadi prioritas, baik swasta maupun pemerintah.
- d. Sektor tersebut harus berkembang dan mampu mempengaruhi sektor-sektor lainnya.

6. Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB)

Produk Daerah Regional Bruto PDRB merupakan jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang terdapat pada seluruh sektor perekonomian dalam suatu daerah tersebut (Tarigan, 2005). Definisi lain mengenai PDRB adalah jumlah nilai dari suatu produksi barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu daerah dalam periode tertentu (Sjafrizal, 2014).

Untuk menghitung PDRB dapat digunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi (*production approach*), pendekatan pendapatan (*income approach*) dan pendekatan pengeluaran (*expenditure approach*). Pendekatan produksi merupakan penjumlahan dari nilai produksi barang dan jasa yang diproduksi oleh daerah pada periode atau tahun tertentu. Pendekatan pengeluaran merupakan jumlah dari nilai pengeluaran yang dilakukan pada suatu daerah yang bersangkutan. Jika pendekatan pendapatan yang digunakan, maka PDRB adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh masyarakat pada suatu daerah (Sjafrizal, 2014).

Pendapatan regional dibedakan menjadi dua bentuk yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Pada umumnya, laju pertumbuhan ekonomi diukur dari kenaikan nilai konstan (Tarigan, 2005).

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai sektor basis telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Berikut adalah beberapa hasil penelitian terdahulu:

Basuki pada tahun 2009 melakukan penelitian dengan judul “Analisis Potensi Unggulan Kabupaten Kepulauan Yapen dalam Menopang Pembangunan Provinsi Papua Tahun 2004-2008”. Dari hasil analisis MRP, menunjukkan bahwa 1) sektor listrik, 2) gas dan air bersih dan 3) sektor perdagangan, restoran dan hotel merupakan sektor yang dominan pertumbuhannya. Dari hasil analisis *Shift-share* terlihat bahwa terjadi pergeseran pembangunan di Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua, artinya terjadi laju pertumbuhan yang signifikan. Hampir seluruh sektor ekonomi memiliki pengaruh keunggulan kompetitif, kecuali 1) sektor bangunan, 2) angkutan dan komunikasi dan 3) jasa. Dari hasil perhitungan LQ dapat disimpulkan bahwa keunggulan ekonomi yang dimiliki Kabupaten Kepulauan Yapen adalah sebagian besar sektor kecuali sektor pertambangan dan penggalian, dan industri pengolahan. Adapun sektor yang menguntungkan adalah layanan keuangan, jasa perusahaan, dan sektor konstruksi. Sektor ekonomi lain yang juga menguntungkan yaitu industri wisata, seperti sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Selain judul di atas, pada tahun 2009 Basuki juga melakukan penelitian bersama Gayatri dengan judul “Penentu Sektor Unggulan dalam Pembangunan Daerah: Studi Kasus di Kabupaten Ogan Komering Ilir”. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis

MRP, *Shift-share*, *Overlay*, LQ dan *Klassen Typology*. Dari analisis tersebut diperoleh hasil bahwa sektor pertanian merupakan sektor unggulan. Sektor industri pengolahan menunjukkan sektor yang pertumbuhannya dominan tetapi kontribusinya kecil. Sektor bangunan, sektor perdagangan, restoran dan hotel serta sektor jasa-jasa merupakan sektor yang pertumbuhannya kecil tetapi kontribusinya besar. Dan yang terakhir yaitu sektor non potensial terdiri dari sektor pertambangan dan penggalian, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.

Pada tahun yang sama, yaitu tahun 2009 Ma'ruf juga melakukan penelitian dengan judul "Anatomi Makro Ekonomi Regional: Studi Kasus Provinsi DIY". Dari hasil analisis *Shift-share* diketahui bahwa sektor konstruksi, penggalian dan pertanian relatif lebih kompetitif dibandingkan enam sektor lainnya yang memiliki nilai negatif. Hasil analisis SLQ nampak bahwa hanya dua sektor yang bukan merupakan sektor basis yaitu sektor penggalian dan sektor industri pengolahan, sedangkan tujuh sektor lainnya merupakan sektor basis. Dari hasil analisis DLQ menunjukkan bahwa perkembangan sektor penggalian, konstruksi dan pertanian lebih baik dibandingkan sektor yang sama pada tingkat provinsi. Penggabungan hasil analisis SLQ dan DLQ menghasilkan empat pengelompokan sektor yaitu kategori unggulan, prospektif, andalan dan kurang prospektif. Sektor pertanian dan konstruksi termasuk ke dalam sektor unggulan. Sektor prospektif meliputi sektor listrik dan air bersih; perdagangan, hotel dan

restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan persewaan dan jasa perusahaan; dan jasa-jasa. Sebagai sektor andalan yaitu sektor penggalian, sedangkan sektor pengolahan merupakan sektor yang kurang prospektif. Hasil analisis Tipologi Klassen menunjukkan bahwa sektor prima adalah perdagangan, hotel dan restoran. Sektor potensial adalah pertanian; industri pengolahan; dan jasa-jasa. Sektor berkembang/ tumbuh adalah listrik dan air bersih; konstruksi; pengangkutan dan komunikasi; dan keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Sektor yang terbelakang/ kurang potensial adalah penggalian.

Selanjutnya, pada tahun 2014, Amalia melakukan penelitian dengan judul “Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian Wilayah di Indonesia”. Penelitian ini menggunakan alat analisis LQ dan *Shift-share*. Hasil analisis LQ menunjukkan ada tiga sektor basis yaitu sektor pertanian, industri pengolahan serta keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Berdasarkan analisis *Shift-share* menunjukkan sektor yang kompetitif adalah sektor keuangan dan jasa perusahaan.

Pada tahun yang sama Pajeru, Hafizrianda dan Bisai melakukan penelitian dengan judul “Analisis pertumbuhan dan Potensi Sektoral Pertanian dalam Perekonomian Kabupaten Jayawijaya Tahun 2008-2012”. Hasil analisis LQ menunjukkan bahwa sektor yang perlu dikembangkan dalam sektor pertanian hanya terdapat dua sub sektor yaitu sektor tanaman bahan makanan dan peternakan dan hasil-hasilnya. Adapun berdasarkan

analisis *Shift-share* dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh sektor pertanian diindikasikan memiliki potensi yang rendah untuk dikembangkan.

Ratnasari juga melakukan penelitian pada tahun 2014 dengan judul “*Sectors Analysis and Determination of GDP Forming Leading Sector in District Kebumen*”. Hasil analisis LQ menunjukkan bahwa 1) sektor pertambangan dan penggalian, 2) sektor pertanian, 3) sektor jasa-jasa dan 4) sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan merupakan sektor basis, dan sisanya merupakan sektor non basis. Hasil analisis pergeseran struktural menunjukkan tidak adanya pergeseran struktur ekonomi, di mana yang menjadi tumpuan pendapatan daerah masih sektor primer. Hasil analisis *Overlay* menunjukkan bahwa sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor kompetitif dan komparatif. Sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki tingkat pertumbuhan rendah baik di wilayah analisis maupun referensi, namun masih unggul di sisi kontribusi. Sektor industri pengolahan mempunyai pertumbuhan yang tinggi pada wilayah analisis maupun referensi, namun tidak unggul pada sisi kontribusi. Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan jasa-jasa mempunyai pertumbuhan yang tinggi pada wilayah referensi, namun rendah pada wilayah analisis, dan unggul pada sisi kontribusi. Dari analisis Tipologi Klassen diperoleh hasil bahwa sektor pertambangan dan penggalian serta sektor jasa-jasa adalah sektor yang maju dan tumbuh cepat, sektor maju tapi tertekan terdiri dari sektor pertanian dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, sektor potensial dan masih dapat berkembang ialah sektor

industri pengolahan. Hasil analisis sektor unggulan yang perlu dikembangkan adalah sektor jasa-jasa.

Pada tahun 2015, Hajeri, Yurisinthae dan Dolorosa melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian di Kabupaten Kubu Raya”. Dari hasil analisis Tipologi Klassen diperoleh bahwa sektor yang merupakan sektor maju dan tumbuh cepat yaitu sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, serta sektor pengangkutan dan komunikasi. Dari analisis LQ diperoleh hasil bahwa sektor basis terdiri dari sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, serta sektor pengangkutan dan komunikasi. Adapun dari hasil analisis *Shift-share* diperoleh bahwa terjadi perubahan struktur ekonomi di Kabupaten Kubu Raya dari sektor industri pengolahan (sekunder) ke sektor pengangkutan dan komunikasi (tersier) kemudian menuju sektor pertanian (primer).

Selanjutnya, Putra dan Kartika pada tahun yang sama yaitu tahun 2015 juga melakukan penelitian dengan judul “Analisis Sektor Potensial dan Kesempatan Kerja Sektoral di Kabupaten Buleleng”. Hasil perhitungan LQ, MRP dan *Overlay* menunjukkan bahwa sektor potensial di Kabupaten Buleleng adalah sektor pertanian. Berdasarkan hasil analisis *Shift-share* diperoleh bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki daya saing kompetitif dan spesialisasi.

Mangilaleng, Rotinsulu dan Rompas juga melakukan penelitian pada tahun yang sama dengan judul “Analisis Sektor Unggulan kabupaten

Minahasa Selatan”. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah LQ dan *Shift-share*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang menjadi sektor unggulan yaitu sektor pertambangan, sektor pertanian, sektor konstruksi dan sektor industri. Sektor yang mempunyai daya saing terbesar di Kabupaten Minahasa Selatan yaitu sektor pertanian, sektor konstruksi dan sektor industri.

Tahun 2017, Riantika dan Utama melakukan penelitian dengan judul “Penentuan Prioritas Pembangunan Melalui Analisis Sektor-Sektor Potensial di Kabupaten Gianyar”. Dari hasil analisis *Overlay* diperoleh beberapa kesimpulan yaitu sektor ekonomi berpotensi untuk dikembangkan di Gianyar adalah sektor industri pengolahan; sektor penyedia akomodasi dan makan minum; sektor informasi dan komunikasi; sektor *real estate*; sektor jasa perusahaan; sektor jasa kegiatan sosial wajib dan kesehatan dan sektor jasa lainnya. Sedangkan sektor yang memiliki potensi untuk menentukan prioritas pembangunan di wilayah Gianyar adalah sektor penyedia akomodasi dan makan minum, sektor *real estate* dan jasa kesehatan.

TABEL 2.1.
Penelitian Terdahulu

Judul	Peneliti	Variabel	Metode Analisis	Hasil
Analisis Potensi Unggulan Kabupaten Kepulauan Yapen dalam Menopang Pembangunan Provinsi Papua Tahun 2004-2008	Basuki (2009)	PDRB Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2004-2008	MRP, <i>Shift-share</i> (SS), <i>Location Quotient</i> (LQ), <i>Overlay</i> dan <i>Klassen Typology</i>	Hasil dari penelitian ini adalah Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki kelebihan ekonomi di sebagian besar sektor, kecuali sektor industri pertambangan dan manufaktur. Sektor jasa, keuangan, perusahaan jasa, dan konstruksi adalah sektor yang paling menguntungkan. Sektor lainnya yang juga menguntungkan adalah industri pariwisata dan pendukungnya, seperti perdagangan, hotel dan restoran.
Penentu Sektor Unggulan dalam Pembangunan Daerah: Studi Kasus di Kabupaten Ogan Komering Ilir	Basuki dan Gayatri (2009)	PDRB Kabupaten Ogan Komering Ilir	MRP, <i>Shift-share</i> , <i>Overlay</i> , LQ dan <i>Klassen Typology</i>	Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa potensi ekonomi yang dimiliki kabupaten Ogan Komering Ilir adalah sektor pertanian dan industri manufaktur yang merupakan pertumbuhan sektor dominan.
Anatomi Makro Ekonomi Regional: Studi Kasus Provinsi DIY	Ma'ruf (2009)	PDRB Provinsi DIY	<i>Shift Share Analysis</i> (SS), Analisis Lokasi Quotient (LQ) dan analisis Rasio Output Modal Tambahan (<i>Incremental Capital Output Ratio / ICOR</i>)	Studi ini menyimpulkan sektor perdagangan, hotel dan restoran memiliki kontribusi besar, sedangkan sektor pertanian, pengolahan industri dan jasa adalah potensi yang akan dikembangkan.

Lanjutan Tabel 2.1.

Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian Wilayah di Indonesia	Amalia (2014)	PDRB Kabupaten Bone Bolango	<i>Location Quotient (LQ)</i> dan <i>Shift-share</i>	Hasil analisis LQ menunjukkan ada tiga sektor basis yaitu sektor pertanian, industri pengolahan serta keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Berdasarkan analisis <i>Shift-share</i> , maka sektor yang kompetitif adalah sektor keuangan dan jasa perusahaan.
Analisis pertumbuhan dan Potensi Sektoral Pertanian dalam Perekonomian Kabupaten Jayawijaya Tahun 2008-2012	Pajeru, Hafizrianda dan Bisai (2014)	PDRB atas dasar harga konstan di Kabupaten Jayawijaya dan Provinsi Papua Tahun 2008-2012	<i>Location Quotient, Shift-share, Model Rasio Pertumbuhan, Tipologi Klassen dan Overlay</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sektor yang perlu dikembangkan pada sektor pertanian hanya ada dua sub sektor saja yaitu tanaman bahan makanan dan sub sektor peternakan.
<i>Sectors Analysis and Determination of GDP Forming Leading Sector in District Kebumen</i>	Ratnasari (2014)	PDRB Kabupaten Kebumen, GDP Provinsi Jawa tengah dengan observasi tahun 2005-2009	LQ, <i>Shift-share, Klassen Typology, Model Growth Ratio (MRP), dan Overlay.</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan sektor unggulan yang harus dikembangkan adalah sektor jasa-jasa karena sektor tersebut memiliki kontribusi yang besar bagi PDRB di Kabupaten Kebumen dan pertumbuhan sektornya positif di tingkat provinsi maupun kabupaten.
Analisis Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian di Kabupaten Kubu Raya	Hajeri, Yurisinthae dan Dolorosa (2015)	PDRB Kabupaten Kubu Raya dan Provinsi Kalimantan Barat dari tahun 2008 sampai 2013 berdasarkan harga pokok konstan.	Tipologi Klassen, gabungan Lokasi Quotient dan <i>Dynamic Location Quotient, Shift-share.</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor unggulan di Kabupaten Kubu Raya adalah sektor pengangkutan dan komunikasi. Sektor industri dan sektor listrik, gas, dan air bersih adalah sektor yang berpotensi menjadi sektor unggulan, serta sub sektor pertanian yaitu sektor peternakan merupakan sub sektor berpotensi menjadi sub sektor unggulan di Kabupaten Kubu Raya.

Lanjutan Tabel 2.1.

Analisis Sektor Potensial dan Kesempatan Kerja Sektoral di Kabupaten Buleleng	Putra dan Kartika (2015)	Kontribusi dan laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan, angkatan kerja yang bekerja, jumlah penduduk, jarak antar kabupaten di Provinsi Bali	LQ, MRP, <i>Overlay</i> , Analisis Gravitasi, <i>Shift-share Esteban Marquillas</i> , <i>Shift-share</i>	Hasil penelitian menunjukkan sektor potensial adalah sektor pertanian. Sektor ini perlu dikembangkan untuk menunjang kenaikan PDRB di Kabupaten Buleleng.
Analisis Sektor Unggulan Kabupaten Minahasa Selatan	Mangilaleng, Rotinsulu dan Rompas (2015)	<i>PDRB Kabupaten Minahasa dan PDRB Sulawesi Utara tahun 2004-2013 Atas Dasar Harga Berlaku maupun Atas Dasar Harga Konstan</i>	LQ dan <i>Shift-share</i>	<i>Hasil penelitian ini diperoleh bahwa yang menjadi sektor unggulan yaitu sektor pertambangan, sektor pertanian, sektor konstruksi, sektor industri, dan sektor yang mempunyai daya saing terbesar di Kabupaten Minahasa Selatan yaitu sektor pertanian, sektor konstruksi, sektor industri.</i>
Penentuan Prioritas Pembangunan Melalui Analisis Sektor-Sektor Potensial di Kabupaten Gianyar	Riantika dan Utama (2017)	PDRB Kabupaten Gianyar	Analisis <i>Location Quotient</i> (LQ), <i>Dinamic Location Quotient</i> (DLQ), MRP, <i>overlay</i> dan Analisis kualitatif	Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa sektor penyedia akomodasi dan makan minum, sektor <i>real estate</i> , dan jasa kesehatan merupakan prioritas utama yang perlu dikembangkan di Kabupaten Gianyar.

C. Kerangka Pemikiran

Ketimpangan pembangunan antar daerah adalah fenomena yang umum terjadi dalam proses pembangunan ekonomi di suatu daerah. Perbedaan potensi ekonomi dan geografis suatu wilayah menjadi faktor utama yang dapat menyebabkan ketimpangan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan untuk mengurangi ketimpangan yang terjadi antar wilayah.

Pelaksanaan otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah memiliki wewenang yang luas untuk mengatur dan mengembangkan wilayahnya. Pelaksanaan pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah perlu mengetahui sektor-sektor apa saja yang dapat dijadikan sektor basis baik untuk masa sekarang maupun untuk masa mendatang. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat mengeluarkan kebijakan untuk mendorong pengembangan sektor basis, sehingga kontribusi sektor tersebut pada PDRB akan meningkat.

Melalui data PDRB, akan diteliti dan dianalisis sektor-sektor yang menjadi sektor basis dan potensial untuk dikembangkan, sehingga mempermudah pemerintah dalam menyusun kebijakan. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat menyusun kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Kulon Progo ke arah yang lebih baik dan berdampak pada peningkatan pertumbuhan daerah dan dapat mencapai keberhasilan pembangunan wilayah.

Berdasarkan data dari PDRB, dapat dilakukan beberapa analisis untuk memperoleh informasi tentang:

1. Sektor basis dan non basis

Kegiatan ekonomi wilayah diklasifikasikan ke dalam dua sektor yaitu sektor basis dan non basis. Analisis sektor basis dan non basis diperlukan untuk mengidentifikasi kegiatan ekonomi daerah yang bersifat ekspor dan non ekspor. Selain itu, untuk mengidentifikasi laju pertumbuhan sektor basis dan non basis dari tahun ke tahun. Barang dan jasa dari sektor basis yang dapat diekspor akan menghasilkan pendapatan bagi daerah yang bersangkutan serta meningkatkan konsumsi dan investasi. Untuk menentukan sektor basis dan non basis digunakan analisis LQ.

2. Perubahan dan pergeseran sektor

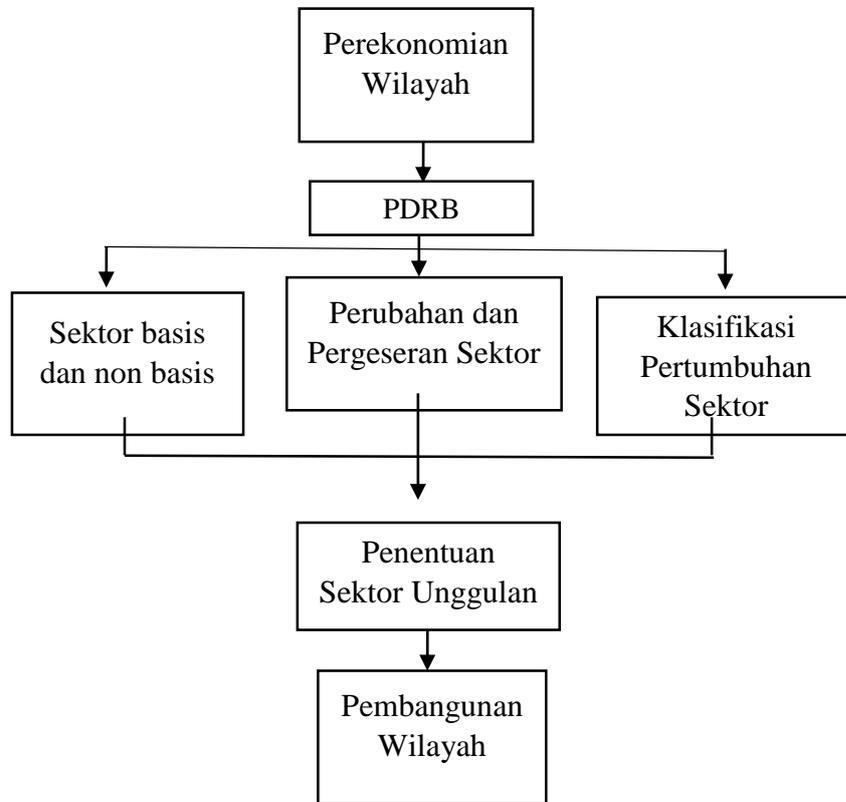
Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi perubahan dan pergeseran sektor pada perekonomian suatu daerah. Hasil analisis ini menunjukkan perbandingan kinerja sektor yang terdapat pada PDRB suatu wilayah yang bersangkutan dengan wilayah referensi. Jika penyimpangan positif, maka dapat dikatakan bahwa sektor dalam PDRB memiliki keunggulan kompetitif dan sebaliknya. Perubahan dan pergeseran sektor ekonomi wilayah dapat ditentukan dengan analisis *Shift-share*

3. Klasifikasi pertumbuhan sektor

Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi posisi perekonomian di tingkat daerah dengan mengacu pada perekonomian daerah yang lebih tinggi. Hasil analisis ini akan menunjukkan posisi sektor dalam PDRB yang diklasifikasikan atas sektor maju dan tumbuh pesat, sektor maju tapi tertekan, sektor berkembang dan sektor relatif tertinggal. Berdasarkan klasifikasi ini dapat dijadikan dasar bagi penentuan kebijakan pembangunan atas posisi perekonomian yang dimiliki wilayah yang bersangkutan terhadap perekonomian daerah yang menjadi referensi. Klasifikasi sektor ini diperoleh melalui analisis *Klassen Typology*.

4. Penentuan sektor unggulan

Analisis ini digunakan untuk menentukan sektor unggulan yang terdapat pada suatu wilayah yang bersangkutan. Hasil dari analisis ini diperoleh berdasarkan analisis *Location Quotient*, *MRP*, dan *Klassen Typology*. Hasil perhitungan penentuan sektor unggulan tersebut yaitu sektor yang tergolong kriteria sektor basis, sektor yang menonjol di tingkat kabupaten serta sektor yang maju dan tumbuh cepat.



GAMBAR 2.2.

SKEMA KERANGKA PEMIKIRAN